

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 14 TAHUN 1950**  
**TENTANG**  
**PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN**  
**DALAM LINGKUNGAN PROPINSI DJAWA BARAT**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang:** bahwa telah tiba saatnja untuk membentuk daerah-daerah kabupaten, jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat termaksud dalam Undang-undang No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah;

**Mengingat:** pasal 5 ayat (1) pasal 20 ayat (1) pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar, Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X, Undang-undang No. 22 tahun 1948 dan Undang-undang No. 11 tahun 1950;

**Dengan persetujuan** Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

- I. Mentjabut Staatsblad 1925 No. 379 s/d No. 396 tentang pembentukan daerah-daerah otonoom kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat;
- II. Menetapkan pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat dengan peraturan sebagai berikut:

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Daerah-daerah jang meliputi daerah kabupaten: 1. Tangerang (Djakarta), 2. Djatinegara, 3. sebagian Krawang, jang terdiri dari kawedanan-kawedanan Tambun, Srengseng, Tjikarang, Rengasdengklok, Tjikampek dan Krawang, 4. bagian Krawang ketinggalannja jang terdiri dari kawedanan-kawedanan Subang, Segalaherang, Pamanukan, Tjiasem, dan Purwakarta, 5. Serang, 6. Pandeglang, 7. Lebak, 8. Bogor, 9. Sukabumi, 10. Tjiandjur, 11. Bandung, 12. Sumedang, 13. Garut, 14. Tasikmalaja, 15. Tjiamis, 16. Tjirebon, 17. Kuningan, 18. Indramaju dan 19. Madjalengka,

ditetapkan mendjadi Kabupaten:

1. Tangerang, 2. Bekasi, 3. Krawang, 4. Purwakarta, 5. Serang, 6. Pandeglang, 7. Lebak, 8. Bogor, 9. Sukabumi, 10. Tjiandjur, 11. Bandung, 12. Sumedang, 13. Garut, 14. Tasikmalaja, 15. Tjiamis, 16. Tjirebon, 17. Kuningan, 18. Indramaju dan 19. Madjalengka.

## Pasal 2

- (1) Pemerintahan Daerah Kabupaten tersebut No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17 dan 19 dalam pasal 1 di atas berkedudukan di kota Kabupaten yang bersangkutan dan Pemerintahan Daerah tersebut No. 8, 9, 11 dan 16 dalam pasal 1 di atas berkedudukan berturut-turut dalam kota Bogor, Sukabumi, Bandung dan Tjirebon.
- (2) Dalam keadaan luar biasa kedudukan itu untuk sementara waktu oleh Kepala Daerah Propinsi Djawa Barat dapat dipindahkan ke lain tempat.

## Pasal 3

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten:

1. Tangerang	terdiri dari	28
2. Bekasi	terdiri dari	35
3. Krawang	terdiri dari	20
4. Purwakarta	terdiri dari	20
5. Banten	terdiri dari	32
6. Pandeglang	terdiri dari	20
7. Lebak	terdiri dari	20
8. Bogor	terdiri dari	35
9. Sukabumi	terdiri dari	25
10. Tjiandjur	terdiri dari	33
11. Bandung	terdiri dari	35
12. Sumedang	terdiri dari	21
13. Garut	terdiri dari	35
14. Tasikmalaja	terdiri dari	35
15. Tjiamis	terdiri dari	35
16. Tjirebon	terdiri dari	35
17. Kuningan	terdiri dari	24
18. Indramaju	terdiri dari	32
19. Madjalengka	terdiri dari	28

- (2) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten tersebut dalam ayat 1 pasal ini, yang pertama terbentuk dengan Undang-undang pemilihan meletakkan jabatannya bersama-sama pada tanggal 15 Juli 1955.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten-kabupaten tersebut dalam ayat (1) pasal ini, ketjuali anggota Kepala Daerah adalah sebanyak-banyaknya 5 orang.

## BAB II

### **TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH-DAERAH KABUPATEN TERSEBUT DALAM PASAL 1**

#### Pasal 4

(1) Urusan rumah tangga dan kewadajiban-kewadajiban lain sebagai dimaksudkan dalam pasal 23 dan 24 Undang-undang No. 22 tahun 1948 bagi kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1 adalah sebagai berikut:

- I. Urusan Umum
- II. Urusan Pemerintahan Umum
- III. Urusan Agraria
- IV. Urusan Pengairan, Djalan-djalan dan Gedung-gedung
- V. Urusan Pertanian, Perikanan dan Koperasi
- VI. Urusan Kehewanan
- VII. Urusan Kerajinan, Perdagangan Dalam Negeri dan Perindustrian
- VIII. Urusan Perburuhan
- IX. Urusan Sosial
- X. Urusan Pembagian (distribusi)
- XI. Urusan Penerangan
- XII. Urusan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan
- XIII. Urusan Kesehatan
- XIV. Urusan Perusahaan

(2) Urusan-urusan tersebut dalam ayat (1) di atas didjelaskan dalam daftar terlampir ini (lampiran A) dan dalam peraturan-peraturan pelaksanaan pada waktu penjerahan.

(3) Tiap-tiap waktu dengan mengingat keadaan, urusan rumah tangga Kabupaten dan kewadajiban Pemerintah yang diserahkan kepada Kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1, dengan Undang-undang dapat ditambah.

(4) Kewadajiban-kewadajiban yang lain dari pada yang tersebut dalam ayat (1) di atas, yang dikerdjakan oleh Kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1, sebelum dibentuk menurut Undang-undang ini, dilandjutkan sehingga ada pentjabutannja dengan Undang-undang.

#### Pasal 5

(1) Segala milik berupa barang tetap maupun berupa barang tidak tetap dan perusahaan-perusahaan Kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1, sebelum dibentuknja menurut Undang-undang ini mendjadi milik kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1, yang selandjutnja dapat menjerahkan sesuatunja kepada daerah-daerah di bawahnja.

(2) Segala hutang piutang Kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1 sebelum pembentukan menurut Undang-undang ini, mendjadi tanggungannja Kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1.

#### Pasal 6

Peraturan-peraturan kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1, sebelum pembentukan menurut Undang-undang ini, dan belum diganti dengan peraturan kabupaten-kabupaten dalam pasal 1 sesudah dibentuk, berlaku terus sebagai peraturan kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1.

Peraturan-peraturan tersebut tidak akan berlaku lagi, sesudah lima tahun terhitung dari berdirinya Kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1 menurut Undang-undang ini.

#### Pasal 7

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari yang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Agar Undang-undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta

Pada tanggal 8 Agustus 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)  
ASSAAT

MENTERI DALAM NEGERI  
SOESANTO TIRTOPRODJO

Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950

MENTERI KEHAKIMAN  
A.G. PRINGGODIGDO

## **LAMPIRAN UNDANG-UNDANG 1950 No. 14**

### **LAMPIRAN A**

#### **I. URUSAN UMUM (TATA USAHA), meliputi:**

1. pekerdjaan persiapan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sendiri;
2. persiapan rentjana anggaran pendapatan dan belandja, perhitungan anggaran pendapatan dan belandja dan hal-hal lain jang mengenai anggaran pendapatan dan belandja;
3. pekerdjaan keuangan sendiri;
4. urusan pegawai;
5. arsip dan ekspedisi;
6. penjelidikan anggaran pendapatan dan belandja dan perhitungan anggaran pendapatan dan belandja daerah-daerah otonom di bawahnja untuk disahkan;
7. pengawasan keuangan daerah-daerah otonom di bawahnja.

#### **II. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, meliputi:**

1. pengawasan berdjalanja peraturan kabupaten;
2. pimpinan dan pengawasan pekerdjaan daerah-daerah otonom di bawahnja;
3. pelaksanaan penetapan atas perobahan batas-batas daerah-daerah di bawahnja.
4. urusan kewarganegaraan (medebewind);
5. menetapkan pemilihan kepala desa;
6. pemeriksaan dan pemutusan pengaduan desa;
7. pemberian idzin keramaian;
8. pengakuan dengan resmi (verlijden) akte-akte di bawah tangan;
9. burgerlijke stand bagi beberapa golongan penduduk menurut peraturan-peraturan jang masih berlaku (medebewind);
10. penjumpahan pegawai Negeri jang bertanggung djawab (medebewind);
11. pengeluaran pas pergi hadji (medebewind);
12. pemberian idzin mengadakan penarikan uang derma;
13. pemberian idzin menghutangkan uang menurut peraturan tentang tukang mindering (medebewind);
14. menjatahkan tutupan daerah disebabkan penyakit menular bagi orang dan hewan (medebewind);
15. mendjalankan surat paksa dan keputusan hakim (medebewind);
16. penarikan uang denda dan ongkos perkara (medebewind);
17. penetapan, pengangkatan dan pemberhentian pamong desa;
18. penetapan panitya pilihan kepala desa (medebewind);
19. penetapan panitya anselah pajak penghasilan, kekajaan dan personil (medebewind);

20. pekerjaan rupa-rupa yang tidak termasuk pada salah satu kewajiban (bagian) urusan lain.

**III. URUSAN AGRARIA (TANAH), meliputi:**

1. pemeriksaan dan pengesahan kontrak tanah antara warga Negara Indonesia dan bangsa asing (medebewind);
2. pemberian izin pembukaan tanah oleh daerah-daerah di bawahnya atau oleh warga Negara Indonesia (medebewind);
3. pemberian izin menempati tanah mentah oleh bangsa asing (medebewind).

**IV. URUSAN PENGAIRAN, DJALAN-DJALAN DAN GEDUNG-GEDUNG, meliputi:**

1. melaksanakan peraturan-peraturan propinsi yang mengenai pemakaian air dari pengairan umum untuk pertanian dan lain-lain kepentingan daerah dan Negara (medebewind);
2. kekuasaan atas jalan-djalan termasuk tanah-tanah, bangun-bangunan dan pohon-pohon dalam lingkungannya, yang diserahkan oleh Pemerintah kepada kabupaten (medebewind);
3. kekuasaan atas gedung-gedung Negeri yang diserahkan oleh Pemerintah kepada kabupaten (medebewind).

**V. URUSAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KOPERASI, meliputi:**

**Pertanian:**

1. mendjalankan pimpinan dan pengawasan ke daerah dibawahnya; melaksanakan rantjangan-rantjangan yang diterima dari Propinsi (medebewind);
2. mengadakan persemaian bibit baru dan mengurus yang telah ada (padi, polowidjo);
3. mengadakan kebun buah-buahan dan sajian untuk membikin dan menjiarkan bibit-bibit yang terpilih;
4. mengadakan seteleng pertjontohan (demonstrasi) pertanian dan perkebunan;
5. mengadakan bibit, alat-alat pertanian, rabuk dan sebagainya;
6. mengadakan kursus-kursus tani;
7. pembanterasan hama, penyakit tanaman dan gangguan-gangguan binatang.

**Perikanan:**

mengadakan dan memajukan pemeliharaan ikan (air tawar) dan mengatur pendjualan ikan air tawar dan laut (medebewind).

**Koperasi:**

menggiatkan, memimpin dan membantu koperasi-koperasi di daerahnya.

**VI. URUSAN KEHEWANAN, meliputi:**

1. mendjalankan pembanterasan dan pentjegahan penjakit menular menurut petundjuk Propinsi (medebewind);
2. mendjalankan pembanterasan penjakit hewan jang tidak menular (medebewind);
3. mendjalankan veterinaire hygiene;
4. mengurus perdagangan hewan dengan daerah-daerah lain dan koordinasi perdagangan dalam kabupaten sendiri;
5. memadjukan peternakan dengan djalan:
  - a. mengusahakan kemadjuan mutu dan djumlah jang telah tertjapai (pemeriksaan pemotongan hewan betina, pengebirian, pengawasan perdagangan hewan keluar daerah dan seteling hewan);
  - b. mengawinkan hewan pada waktu jang tepat;
  - c. memperbaiki pemeliharaan dan pemakaian ternak;
  - d. pembanterasan potongan gelap.
6. mendjalankan usaha supaja kehewananan mempunjai arti ekonomis jang lain.

**VII. URUSAN KERADJINAN, PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN PERINDUSTRIAN,** meliputi:

membangun, menggiatkan, menjokong dan memimpin usaha rakjat dalam lapangan keradjinan, perdagangan dan perindustrian.

**VIII. URUSAN PERBURUHAN,** meliputi:

1. menjelenggarakan pentjatjatan tenaga umumnja, pengangguran chususnja dan mengumpulkan bahan-bahan serta membuat tindjauan (analyse) tentang keadaan tenaga pada tiap-tiap waktu jang tertentu (medebewind);
2. menghubungkan pentjari pekerdjaan dengan pentjari tenaga (medebewind);
3. menjelenggarakan pemberian sokongan pengangguran (medebewind);
4. menjelenggarakan usaha-usaha lain di lapang kesedjahteraan kaum penganggur dimana diperlukan (medebewind);
5. pengawasan pekerdjaan daerah otonom di bawahnja tentang urusan perburuhan (medebewind).

**IX. URUSAN SOSIAL,** meliputi:

**A. Pembimbing dan Penjuluh Sosial**

1. pendidikan dan penerangan sosial untuk rakjat (medebewind);
2. pendidikan untuk pengemis, pengembara dan pemalas (medebewind);
3. pendidikan untuk anak-anak terlantar dan anak-anak nakal (medebewind);
4. pendidikan untuk memperbaiki orang-orang jang mendjalankan kemaksiatan (pelatjuran, djudi, pemadatan, dan lain-lain) (medebewind);
5. statistiek dan dokumentasi (medebewind).

**B. Perbaikan Masyarakat**

1. penjelidikan beban-beban dalam penghidupan rakyat (medebewind);
2. perbaikan perumahan dan perkampungan (medebewind);
3. pembanterasan dan pentjegahan kemaksiatan (medebewind).

**C. Perbantuan**

1. perawatan pengemis, pengembara dan pemalas;
2. perawatan yatim-piatu, anak-anak terlantar dan anak-anak nakal;
3. bantuan kepada orang-orang terlantar;
4. bantuan kepada anak-anak dan orang-orang bekas hukuman dan rawatan perumahan (medebewind);
5. bantuan kepada korban bentjana alam (medebewind);
6. bantuan kepada pengungsi (medebewind);
7. bantuan rakyat korban pertempuran (medebewind);
8. bantuan kepada badan-badan amal partikelir.

**X. URUSAN PEMBAGIAN (DISTRIBUSI), meliputi:**

membantu propinsi menjalankan peraturan tentang distribusi.

**XI. URUSAN PENERANGAN, meliputi:**

menjelenggarakan penerangan kepada rakyat, terutama yang bersifat lokal.

**XII. URUSAN PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN, meliputi:**

1. mendirikan dan menjelenggarakan kursus-kursus pembanterasan buta huruf dan memberi subsidi kepada kursus-kursus pembanterasan buta huruf yang diselenggarakan oleh badan-badan partikelir.
2. mendirikan dan menjelenggarakan kursus-kursus pengetahuan umum tingkat A Negeri dan memberi subsidi kepada kursus-kursus sematjam itu yang diselenggarakan oleh partikelir;
3. mengandjurkan berdirinja, membantu dan mendirikan kursus-kursus vak yang sesuai dengan kebutuhan daerah;
4. mengusahakan perpustakaan rakyat;
5. mendirikan dan menjelenggarakan kursus-kursus pengantar kewadajiban beladjar;
6. memimpin dan memajukan kesenian.

**XIII. URUSAN KESEHATAN, meliputi:**

1. pekerjaan curatief: menjelenggarakan rumah-rumah sakit dan poliklinik;
2. pekerjaan preventief: konsultasi-buro untuk bayi dan orang hamil;
3. mengawasi djawatan-djawatan kesehatan di bawahnja;



4. menjelenggarakan pekerdjaan-pekerdjaan Kementerian Kesehatan dan Propinsi jang diserahkan.

**XIV. URUSAN PERUSAHAAN**, meliputi:

perusahaan-perusahaan jang dapat diselenggarakan oleh kabupaten menurut kebutuhan.